

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Implementasi IPOs perempuan dalam penanganan SGBV *Action for Peacekeeping* menunjukkan bahwa pendekatan *peacebuilding* melalui perspektif feminis liberal menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan keterlibatan perempuan di PoC dengan tujuan memberdayakan korban SGBV. Keterlibatan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat lokal terhadap *peacekeepers*, tetapi juga berkontribusi pada penyediaan pendekatan yang lebih empatik dan sensitif terhadap korban SGBV. Akan tetapi, faktor demografis dan konstruksi sosial di Sudan Selatan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan *peace operation* yang inklusif menyebabkan perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan sulit mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam konteks teknis, IPOs perempuan memiliki posisi strategis dalam menjembatani kesenjangan sosial dan budaya melalui *non-confrontational methods, understanding, dan avoids triggering defensiveness* sebagai akses *social and culture boundaries* resolusi konflik aspek *peacebuilding* mampu membangun ruang aman bagi korban. Namun demikian, data dan analisis penulis menunjukkan bahwa target peningkatan 30% IPOs perempuan di UNMISS dalam *peace operations* pada UNPOL sebagaimana resolusi UNSC terkait penanganan SGBV di Sudan Selatan belum sepenuhnya optimal. Pada level global, salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah terbatasnya anggaran dalam pengerahan IPOs

serta rendahnya pemahaman negara-negara anggota terhadap pentingnya perspektif gender dalam *peace operation*. Ketimpangan tersebut terlihat dalam perekrutan serta minimnya dukungan struktural menyebabkan efektivitas pelaksanaan agenda WPS belum maksimal, meskipun dorongan untuk mencapainya diupayakan oleh aktor-aktor internasional dan lokal.

Di sisi lain, implementasi A4P *Initiative* mengupayakan konsisten dari UNMISS untuk meningkatkan kapasitas perempuan, baik dalam bentuk pelatihan, *community policing*, maupun integrasi *peacekeepers ex-combatan*. Analisis *Galtung's Triangle of Conflict* menunjukkan bahwa *peacebuilding* melalui pendekatan feminis mampu menanggulangi *roots of conflict* melalui pemulihan sosial yang berkelanjutan dan tidak sekadar berorientasi pada penghentian kekerasan fisik. Meskipun demikian, implementasi ini tidak terlepas dari tantangan struktural seperti budaya impunitas terhadap kekerasan. Terkait penanganan tersebut, sudut pandang gender sebagai konstruksi sosial memberikan hasil bahwa pengeralan IPOs perempuan di UNMISS cenderung melekat dengan konsep feminim, sedangkan laki-laki ditugaskan dalam aspek maskulinitas. Meski strategi feminis dalam *peacebuilding* di UNMISS membawa perubahan positif, nyatanya pengeralan belum sepenuhnya optimal.

4.2. Saran

Dengan ditemukannya aspek *vulnerable* karena adanya *gap* gender dalam pengerahan penugasan, maka penulis menawarkan peningkatan kuantitas dan kualitas IPOs perempuan harus diiringi oleh dukungan kebijakan, pendanaan, serta pendidikan kesadaran gender bagi seluruh aktor yang terlibat. Dengan memperkuat kapasitas IPOs perempuan dan mendorong reformasi kelembagaan di tingkat lokal dan internasional diharapkan penanganan SGBV di Sudan Selatan dapat berjalan lebih efektif dalam konteks perdamaian pasca-konflik. Sehingga, pembangunan perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan di Sudan Selatan hanya dapat tercapai jika negara dan seluruh aktor terlibat mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek rekonstruksi sosial-politik.